

PERENCANAAN PROGRAM VAKSINASI RABIES DALAM UPAYA PENCEGAHAN HEWAN PENULAR RABIES (HPR) DI PUSAT KESEHATAN HEWAN KOTA BATU

Vaccination Program Planning in Efforts to Prevent Rabies Transmitting Animals (Rabies Transmitting Animals) at the Batu City Animal Health Center

Hosea Allo Naibaho^{1*}
Firman Firdausi¹
Roro Merry Chornelia
Wulandary¹

¹Universitas Tribhuwana Tinggadewi,
Malang

*corresponding author:
Email: hoseaallonaibaho@gmail.com

Abstrak

Rabies merupakan penyakit zoonosis fatal yang masih menjadi ancaman kesehatan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan perencanaan program vaksinasi yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan program vaksinasi rabies dalam upaya pencegahan Hewan Penular Rabies (HPR) di Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) Kota Batu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan program telah didukung oleh sistem digital iSIKHNAS dan infrastruktur logistik yang memadai, namun implementasinya masih bersifat reaktif akibat status wilayah yang bebas rabies. Keterbatasan lain meliputi belum adanya standar operasional prosedur (SOP) proaktif, minimnya simulasi tanggap darurat, serta belum optimalnya surveilans aktif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem surveilans, formalisasi prosedur, dan peningkatan koordinasi lintas sektor guna menjamin kesiapsiagaan jangka panjang dalam mempertahankan status bebas rabies.

Kata Kunci:

Program vaksinasi
Pencegahan
Penular Rabies

Keywords:

Vaccination program
Prevent
Rabies transmitting

Abstract

Rabies is a fatal zoonotic disease that remains a significant public health threat in Indonesia, necessitating effective and sustainable vaccination program planning. This study aims to analyze the planning of rabies vaccination programs in preventing Rabies Transmitting Animals (RTA) at the Animal Health Center (Puskesmas) of Batu City. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis followed the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that program planning has been supported by the iSIKHNAS digital system and adequate logistical infrastructure. However, implementation remains largely reactive due to the region's rabies-free status. Key limitations include the absence of proactive standard operating procedures (SOPs), limited emergency response simulations, and suboptimal active surveillance. Therefore, strengthening surveillance systems, formalizing procedures, and enhancing cross-sector coordination are essential to ensure long-term preparedness in maintaining a rabies-free status.



© year The Authors. Published by Penerbit Forind. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Link: <http://assyifa.forindpress.com/index.php/assyifa/index>

Submit: 22-12-2025

Accepted: 19-03-2026

Published: 31-03-2026

PENDAHULUAN

Rabies merupakan salah satu penyakit zoonosis yang hingga saat ini masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, baik di tingkat global maupun nasional (World Health Organization, 2024). Penyakit ini disebabkan oleh virus dari genus *Lyssavirus* yang menyerang sistem saraf pusat dan hampir selalu

berakibat fatal apabila tidak segera ditangani secara medis pasca-paparan (World Health Organization, 2024). Secara epidemiologis, sekitar 99% kasus rabies pada manusia disebabkan oleh gigitan Hewan Penular Rabies (HPR), terutama anjing, kucing, dan kera. Di Indonesia, rabies masih menjadi isu kesehatan publik yang signifikan, tercermin dari tingginya angka kasus

gigitan hewan yang mencapai puluhan ribu setiap tahunnya, dengan angka kematian yang masih cukup tinggi (Kementerian Pertanian, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian rabies memerlukan upaya sistematis dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai sektor.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan rabies sebagai salah satu penyakit prioritas dalam program pengendalian penyakit menular, dengan target eliminasi yang dilakukan melalui berbagai strategi, salah satunya adalah vaksinasi massal pada hewan penular rabies. Vaksinasi dianggap sebagai intervensi yang paling efektif dan efisien dalam memutus rantai penularan rabies dari hewan ke manusia, karena berfokus pada sumber utama infeksi (Kementerian Pertanian, 2019). Selain itu, pendekatan ini juga diperkuat dengan upaya edukasi masyarakat, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan hewan, serta penguatan sistem surveilans epidemiologi. Namun demikian, implementasi program vaksinasi rabies di berbagai daerah masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek teknis, sosial, maupun kelembagaan.

Salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan program vaksinasi rabies adalah tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat. Dalam praktiknya, masih banyak pemilik hewan peliharaan yang belum secara rutin melakukan vaksinasi terhadap hewannya (World Organisation for Animal Health, 2023). Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman mengenai bahaya rabies, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan hewan, serta adanya persepsi atau mitos yang berkembang di masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendekatan teknis semata tidak cukup, melainkan perlu diimbangi dengan strategi komunikasi dan pemberdayaan masyarakat yang efektif (Sitepu et al., 2018).

Selain faktor masyarakat, aspek manajerial dan kelembagaan juga memegang peranan penting dalam keberhasilan program vaksinasi rabies. Pusat Kesehatan

Hewan (Puskeswan) sebagai unit pelayanan teknis di tingkat daerah memiliki peran strategis dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program vaksinasi. Perencanaan yang baik mencakup berbagai komponen, seperti pengelolaan logistik vaksin, penentuan target sasaran, pengorganisasian sumber daya manusia, serta koordinasi lintas sektor. Dalam konteks ini, keberadaan sistem informasi yang terintegrasi, seperti iSIKHNAS, menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data (Kementerian Pertanian, 2021).

Kota Batu sebagai salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur memiliki karakteristik yang cukup unik, dengan populasi hewan peliharaan yang relatif tinggi serta mobilitas masyarakat yang dinamis. Meskipun demikian, Kota Batu saat ini berada dalam status bebas rabies (zero case), yang menunjukkan keberhasilan upaya pengendalian yang telah dilakukan. Namun, status ini tidak serta-merta menghilangkan risiko munculnya kembali kasus rabies, terutama jika sistem surveilans dan kesiapsiagaan tidak dijaga secara optimal. Dalam konteks ini, perencanaan program vaksinasi yang bersifat proaktif dan berkelanjutan menjadi sangat penting untuk mempertahankan status bebas rabies tersebut.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi program pengendalian rabies sering kali menghadapi tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kendala distribusi vaksin, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, belum optimalnya sistem surveilans aktif dan ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan program di tingkat lapangan (Sitepu et al., 2018). Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif terhadap proses perencanaan program vaksinasi rabies, khususnya di tingkat Puskeswan, guna mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta peluang perbaikan yang dapat dilakukan.

Penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan karena memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana perencanaan program vaksinasi rabies diimplementasikan di tingkat lokal, khususnya di Puskesmas Kota Batu. Analisis yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga mencakup dimensi manajerial, kelembagaan, serta partisipasi masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan strategi pengendalian rabies yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki nilai aplikatif yang tinggi, karena dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Temuan penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam memperkuat sistem surveilans, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta mengoptimalkan peran masyarakat dalam program vaksinasi rabies. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, upaya pengendalian rabies tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga pada pencegahan yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan program vaksinasi rabies sebagai upaya pencegahan Hewan Penular Rabies (HPR) di Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) Kota Batu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam mendukung pencapaian target nasional eliminasi rabies di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai perencanaan program vaksinasi rabies sebagai upaya pencegahan Hewan Penular Rabies (HPR) di Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) Kota Batu. Pendekatan kualitatif dipilih

karena mampu menggali fenomena secara kontekstual, terutama yang berkaitan dengan aspek manajerial, kelembagaan, serta dinamika implementasi program di lapangan (Creswell & Poth, 2021; Flick, 2022).

Lokasi penelitian ditetapkan di Puskesmas Kota Batu sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki peran strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengendalian rabies di tingkat daerah. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam program vaksinasi rabies. Informan utama terdiri dari tenaga medis veteriner serta pihak terkait di lingkungan Puskesmas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi terkait proses perencanaan, pelaksanaan, serta kendala yang dihadapi dalam program vaksinasi rabies. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas pelayanan, sistem pelaporan, serta sarana dan prasarana pendukung program. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui penelaahan dokumen resmi, laporan kegiatan, serta literatur terkait kebijakan pengendalian rabies.

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model interaktif yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis untuk memudahkan pemahaman. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data secara komprehensif guna menghasilkan temuan yang valid dan bermakna.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Triangulasi sumber

dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini penting untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian.

Fokus penelitian ini mengacu pada indikator perencanaan program pencegahan dan pengendalian rabies sebagaimana dikemukakan oleh Sitepu et al. (2018), yang meliputi aspek surveilans epidemiologi, penemuan dan tata laksana kasus, penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat, serta keberadaan rabies center di tingkat kabupaten/kota. Indikator tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana perencanaan program vaksinasi rabies telah dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi.

Dengan pendekatan metodologis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi aktual perencanaan program vaksinasi rabies di Puskesmas Kota Batu, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang relevan dalam upaya peningkatan kualitas program pengendalian rabies di tingkat lokal.

HASIL

Pelaksanaan P2 Rabies (*Surveilans Epidemiologi*)

Hasil wawancara dengan dokter Wulan terkait pelaksanaan P2 rabies dalam hal surveilans epidemiologi diperoleh hasil bahwa pengumpulan dan pengolahan data populasi HPR serta kasus gigitan di Kota Batu telah menggunakan instrumen digital berupa aplikasi iSIKHNAS dan Google Form. Proses analisis data untuk rekomendasi kebijakan dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, namun saat ini tidak ditemukan wilayah prioritas pemetaan geografis tertentu karena status Kota Batu dan Jawa Timur yang sudah bebas rabies (nol kasus). Periode evaluasi koordinasi terkait sinkronisasi data dengan Dinas Kesehatan ditemukan masih bersifat reaktif, di mana

evaluasi baru akan dilakukan jika ditemukan adanya kasus rabies. Meskipun demikian, narasumber menekankan bahwa integrasi data antara temuan pada hewan dan manusia tetap menjadi landasan utama perencanaan alokasi VAR/SAR, walaupun mekanisme distribusinya belum terbentuk secara sistematis akibat belum adanya kegiatan surveilans aktif yang rutin dilakukan.

Penemuan dan Tata Laksana Kasus

Hasil wawancara dengan dokter terkait penemuan dan tata laksana kasus diperoleh hasil bahwa saat ini belum tersedia SOP khusus untuk respons proaktif terhadap gejala klinis rabies karena wilayah Kota Batu masih berada pada status nol kasus. Penanggung jawab peningkatan kompetensi teknis penanganan hewan tersangka rabies bertumpu pada staf medis internal Puskesmas, yaitu Drh. Muhammad Jalaludin Fida, Drh. Wulandari, dan Drh. Ivo Febrina. Titik pemantauan proaktif dilakukan secara terpusat di Puskesmas dan hanya ditindaklanjuti jika terdapat laporan temuan kasus dari masyarakat. Hingga saat ini, pelaksanaan pelatihan atau simulasi tata laksana kasus bagi petugas lapangan belum pernah dilaksanakan. Namun, jika ditemukan kasus, pihak Puskesmas akan menjalankan protokol isolasi selama 14 hari untuk mengamati gejala klinis spesifik, sementara untuk pengambilan spesimen otak tetap bekerja sama dengan pihak eksternal seperti Laboratorium Universitas, Dinas Provinsi, atau Balai Besar Veteriner Jogja.

Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat

Hasil wawancara dengan dokter Wulan terkait penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat diperoleh hasil bahwa strategi komunikasi yang digunakan adalah melalui media sosial instansi dan pembagian leaflet. Pihak mitra yang dilibatkan mencakup Bidang Peternakan, Dinas Kesehatan, serta peternak atau pemilik hewan, dengan lokasi edukasi yang dipusatkan di kantor Puskesmas dan titik pelaksanaan

vaksinasi massal. Jadwal penyuluhan rutin diselenggarakan dengan momentum *World Rabies Day* setiap bulan September yang dibarengi dengan kegiatan vaksinasi massal gratis. Narasumber menyatakan bahwa pelaporan mandiri masyarakat dianggap krusial agar tindakan pencegahan dapat dilakukan sesegera mungkin guna memutus transmisi. Adapun evaluasi perubahan perilaku pemilik hewan diukur berdasarkan tingkat antusiasme masyarakat saat vaksinasi massal serta jumlah kunjungan vaksinasi mandiri ke Puskesmas.

Keberadaan Rabies Center di Kabupaten/Kota

Hasil wawancara dengan dokter terkait keberadaan Rabies Center diperoleh hasil bahwa meskipun secara formal tidak ada institusi mandiri bernama Rabies Center, fungsinya dijalankan oleh Puskesmas melalui dukungan fasilitas kulkas khusus vaksin (cold chain) yang memadai. Pengelolaan stok vaksin minimal satu kuor berada di bawah otoritas Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, dengan audit kelayakan logistik yang dilakukan secara rutin setiap bulan. Koordinasi administratif antar-sektor dilakukan melalui sistem pelaporan satu pintu untuk mensinkronkan observasi hewan dan perawatan korban. Narasumber menegaskan bahwa aksesibilitas fasilitas dan ketersediaan tenaga medis terlatih sangat menentukan kecepatan respon medis bagi warga. Guna memfasilitasi hal tersebut, sistem informasi telah terintegrasi melalui penyediaan nomor layanan pengaduan (hotline) dan grup komunikasi lintas sektor yang responsif.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan P2 Rabies (*Surveilans Epidemiologi*)

Pelaksanaan program Pencegahan dan Pengendalian (P2) rabies di Kota Batu, khususnya pada aspek surveilans epidemiologi, menunjukkan adanya kemajuan dalam pemanfaatan teknologi informasi melalui penggunaan sistem iSIKHNAS dan instrumen digital lainnya. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menekankan

pentingnya sistem surveilans berbasis data untuk mendukung pengendalian penyakit zoonosis secara efektif (Kementerian Pertanian, 2021). Digitalisasi ini memungkinkan pengumpulan dan pengolahan data populasi Hewan Penular Rabies (HPR) serta kasus gigitan dilakukan secara lebih cepat dan akurat.

Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan surveilans masih bersifat pasif atau reaktif, di mana analisis dan koordinasi lintas sektor baru dilakukan ketika terdapat indikasi kasus. Kondisi ini belum sepenuhnya selaras dengan prinsip surveilans epidemiologi yang ideal, yaitu bersifat aktif, berkelanjutan, dan berbasis risiko (Sitepu et al., 2018). Status Kota Batu sebagai wilayah bebas rabies memang menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya intensitas surveilans aktif, namun hal ini berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap munculnya kembali kasus (re-emergence). Oleh karena itu, diperlukan penguatan surveilans aktif berbasis komunitas dan pemetaan wilayah risiko sebagai langkah preventif jangka panjang.

Penemuan dan Tata Laksana Kasus

Dalam aspek penemuan dan tata laksana kasus, penelitian ini mengidentifikasi bahwa belum terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang bersifat proaktif dalam merespons potensi kasus rabies di lapangan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan implementasi teknis di tingkat operasional. Padahal, dalam strategi nasional pengendalian rabies, kesiapsiagaan melalui prosedur yang terstandarisasi menjadi elemen kunci dalam menekan angka fatalitas akibat keterlambatan penanganan (Kementerian Pertanian, 2019).

Pelaksanaan penanganan kasus yang masih terpusat di Puskesmas serta belum adanya simulasi tanggap darurat secara rutin menunjukkan bahwa sistem respons belum sepenuhnya teruji dalam situasi krisis. Meskipun demikian, upaya isolasi hewan selama 14 hari sebagai bentuk observasi klinis telah sesuai dengan praktik

standar dalam pengendalian rabies. Selain itu, kerja sama dengan laboratorium eksternal dalam pengujian spesimen menunjukkan adanya sinergi kelembagaan yang mendukung kualitas diagnosis.

Secara aplikatif, kondisi ini menuntut perlunya penyusunan SOP proaktif yang mencakup mekanisme deteksi dini, pelaporan cepat, serta respons lapangan yang terintegrasi. Pelatihan dan simulasi berkala bagi tenaga medis veteriner juga menjadi penting untuk meningkatkan kapasitas respons terhadap potensi kejadian luar biasa (KLB).

Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat

Aspek penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat merupakan salah satu faktor determinan dalam keberhasilan program vaksinasi rabies. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan oleh Puskesmas Kota Batu telah memanfaatkan media sosial dan media cetak seperti leaflet, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit zoonosis, di mana partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan program (Kementerian Pertanian, 2021).

Momentum peringatan *World Rabies Day* dimanfaatkan secara strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kegiatan vaksinasi massal gratis. Hal ini merupakan praktik yang efektif dalam meningkatkan cakupan vaksinasi sekaligus membangun kesadaran kolektif masyarakat. Namun, evaluasi keberhasilan program yang masih didasarkan pada tingkat partisipasi dan antusiasme masyarakat menunjukkan perlunya indikator yang lebih terukur, seperti peningkatan cakupan vaksinasi tahunan atau penurunan kasus gigitan HPR.

Lebih lanjut, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi hewan peliharaan masih menjadi tantangan utama. Hal ini menguatkan temuan

penelitian sebelumnya bahwa faktor sosial dan budaya turut memengaruhi efektivitas program pengendalian rabies (Sitepu et al., 2018). Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi risiko yang lebih sistematis dan berkelanjutan, termasuk edukasi berbasis komunitas dan pendekatan kearifan lokal.

Keberadaan Rabies Center di Kabupaten/Kota

Keberadaan Rabies Center sebagai pusat koordinasi penanggulangan rabies di tingkat daerah belum terwujud secara formal di Kota Batu. Namun demikian, fungsi tersebut telah diintegrasikan dalam layanan Puskesmas yang didukung oleh fasilitas rantai dingin (*cold chain*) dan tenaga medis yang kompeten. Hal ini menunjukkan adanya adaptasi kelembagaan dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan kesehatan hewan secara efisien.

Menurut Kementerian Pertanian (2019), keberadaan Rabies Center memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan berbagai aspek pengendalian rabies, mulai dari surveilans, vaksinasi, hingga penanganan kasus. Oleh karena itu, meskipun fungsi tersebut telah berjalan secara *de facto*, formalisasi kelembagaan tetap diperlukan untuk memperkuat legitimasi, koordinasi lintas sektor, serta alokasi sumber daya.

Koordinasi lintas sektor yang telah dilakukan melalui sistem pelaporan satu pintu dan dukungan teknologi komunikasi merupakan langkah positif dalam meningkatkan efektivitas respons. Namun, optimalisasi peran Rabies Center ke depan memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi sistem informasi yang lebih komprehensif.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa perencanaan program vaksinasi rabies di Kota Batu telah memiliki fondasi yang cukup kuat, namun masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi yang bersifat proaktif, integratif, dan berkelanjutan guna mendukung target nasional eliminasi rabies.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap empat indikator perencanaan program rabies di Kota Batu, dapat disimpulkan bahwa pembangunan kesehatan di sektor ini telah memiliki fondasi digitalisasi melalui iSIKHNAS dan infrastruktur logistik yang memadai, namun pelaksanaannya masih cenderung bersifat reaktif akibat kondisi wilayah yang masih bertahan pada status nol kasus rabies. Meskipun secara formal belum terdapat institusi bernama Rabies Center, fungsinya telah diintegrasikan sepenuhnya ke dalam layanan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) melalui penyediaan rantai dingin vaksin dan kompetensi tim medis veteriner internal. Namun, peneliti menemukan celah dalam aspek mitigasi risiko, seperti belum tersusunnya SOP proaktif, ketiadaan simulasi respons darurat yang rutin, serta koordinasi lintas sektor yang baru diintensifkan saat muncul kasus. Oleh karena itu, keberhasilan penyuluhan masyarakat yang terjadwal dan integrasi data berbasis lintas sektor perlu didukung dengan penguatan surveilans aktif dan formalisasi prosedur guna menjamin kesiapsiagaan jangka panjang dalam mempertahankan status wilayah bebas rabies di Kota Batu.

REFERENSI

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Flick, U. (2022). *An introduction to qualitative research* (7th ed.). SAGE Publications.
- Kementerian Pertanian. (2019). *Masterplan Nasional Pemberantasan Rabies di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.
- Kementerian Pertanian. (2021). *Strategi Nasional Pengendalian dan Pemberantasan Rabies*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Radarmalang.com. (20 Desember 2024). *Waspada Rabies, Pemkot Batu Suntik Vaksin 100 Hewan*. Di akses pada 1 Desember 2025, dari <https://radarmalang.jawapos.com/kota-batu/811079881/waspada-rabies-pemkot-batu-suntik-vaksin-100-hewan-peliharaan>
- Sitepu, F.Y., Depari, E., Afriani., Sianturi, C. (2018). Evaluasi program pencegahan dan pengendalian rabies dalam rangka menuju Sumatera Utara bebas rabies. *Journal of Health Epidemiol and Communicable Diseases*, 4(2): 42-48
- World Health Organization (2024). *Rabies: Key facts*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/rabies>
- World Organisation for Animal Health (2023). *Rabies control and community participation*. <https://www.woah.org>